

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERDA KAB.SERANG NO. 5, LD 2025/NO. 5, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Serang wajib menetapkan Peraturan Daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dokumen ini menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan gambaran transparan mengenai posisi keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Peraturan ini juga melampirkan informasi teknis seperti daftar piutang daerah, dana cadangan, serta ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban ini diatur secara teknis melalui Peraturan Bupati.
- CATATAN : -** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 Agustus 2025.